

Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa

Salman Farizi¹, Salwatul Aisy¹, Kamilatur Rodliyah M.², Samsul Arifin³

Akuntansi Syariah, UIN KHAS JEMBER

¹ salman.farizi@uinkhas.ac.id, ² salwatulaisy82@gmail.com, ³ kamilaturrodliyahmuchlis@gmail.com, ⁴ riff1922@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan penerimaan kas di lingkungan pemerintah desa di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, digitalisasi sistem pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, masih banyak desa yang masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola dana desa, yang dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan dan pelaporan yang tidak jelas. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai literatur terkait penerapan SIA, termasuk manfaat, tantangan, dan peraturan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi pemerintah, penelitian sebelumnya, dan literatur akademis terkait sistem keuangan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA dapat meningkatkan kecepatan pencatatan transaksi, mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan SIA adalah terbatasnya infrastruktur teknologi dan langkanya sumber daya manusia di tingkat desa. Oleh karena itu, upaya penguatan pelatihan bagi aparatur desa dan peningkatan infrastruktur teknologi sangat penting untuk mendukung keberhasilan penerapan SIA. Dengan demikian, penerapan SIA diharapkan dapat meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Manajemen Keuangan Desa, Digitalisasi, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi perhatian utama dalam sektor pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam penerimaan kas berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mencatat setiap transaksi keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan kas dilakukan sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang baik¹. Namun, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam implementasi SIA, terutama terkait dengan pemahaman, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang terbatas.

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sumber pendanaan desa, baik yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun sumber lain, harus dikelola dengan transparan dan akuntabel agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan keuangan desa akibat lemahnya pengendalian internal dan kurangnya sistem pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SIA dalam penerimaan kas di pemerintahan desa masih belum sepenuhnya efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap entitas pemerintahan wajib menerapkan sistem pengendalian internal guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SIA dalam penerimaan kas desa merupakan salah satu bentuk penerapan SPIP yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi risiko penyimpangan keuangan. Dengan adanya sistem yang terdigitalisasi, pemerintah desa dapat memantau arus kas secara lebih sistematis dan mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi.

Selain itu, regulasi terkait pengelolaan keuangan desa terus mengalami perkembangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menggunakan metode manual dalam pencatatan transaksi keuangan. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pembukuan, keterlambatan

¹ Z. Fahri and J. Nasution, "Penerapan sistem informasi akuntansi di bagian umum kantor walikota medan," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 9, no. 2, 2021.

penyusunan laporan keuangan, serta sulitnya melakukan audit secara efektif. Oleh karena itu, penerapan SIA menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi pemerintahan desa guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.²

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi serta mempercepat penyusunan laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh zebua dkk tahun 2024 menyimpulkan bahwa penggunaan SIA dalam pengelolaan dana desa mampu mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan transaksi keuangan. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem.³ Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi SIA.

Selain faktor sumber daya manusia, infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan utama dalam penerapan SIA di pemerintahan desa. Beberapa desa di daerah terpencil masih menghadapi kendala akses internet dan keterbatasan perangkat teknologi, sehingga sulit untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Dalam konteks ini, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyediakan infrastruktur yang memadai agar penerapan SIA dapat berjalan secara optimal.

Keberadaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga memungkinkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait penerimaan dan penggunaan kas desa. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Urgensi penerapan SIA dalam penerimaan kas desa juga berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Kasus penyalahgunaan dana desa yang marak terjadi menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencatatan keuangan. Dengan adanya sistem yang terdigitalisasi, setiap transaksi akan tercatat secara otomatis dan dapat diverifikasi dengan lebih mudah, sehingga mengurangi potensi tindakan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan sistem informasi akuntansi dalam penerimaan kas guna meningkatkan pengendalian internal di pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan desa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka.

METODE

Menjelaskan rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, model penelitian, dan teknik analisis. Penelitian harus didukung dengan referensi, maka jelaskan dengan bahasa yang dapat diterima secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam penerimaan kas pemerintah desa berdasarkan berbagai literatur, regulasi, dan penelitian terdahulu.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan data yang digunakan bersumber dari :

- Dokumen Resmi dan Regulasi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan kebijakan terkait sistem keuangan desa.
- Penelitian Terdahulu: Jurnal ilmiah, tesis, atau disertasi yang membahas penerapan SIA dalam pengelolaan keuangan sektor publik.
- Buku dan Literatur Akademik: Buku yang membahas akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, dan manajemen keuangan desa.
- Sumber Online Terpercaya: Artikel dari website resmi pemerintah, laporan lembaga penelitian, dan publikasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dengan langkah-langkah berikut:

- Identifikasi Sumber: Mencari regulasi, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.
- Seleksi Literatur: Memilih literatur yang memiliki kredibilitas tinggi dan sesuai dengan topik penelitian.
- Kategorisasi Data: Mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti:
 - Penerimaan kas dalam pemerintahan desa.
 - Pengelolaan keuangan desa secara manual dan digital.
 - Manfaat dan tantangan implementasi SIA di sektor publik.

4. Teknik Analisis Data

² A. P. Sistem *et al.*, "EKOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan 1 Jurnal.unimor.ac.id/JEP Analysis of Application of Accounting Systems and Procedures in Village Fund Management (Case Study in Grujugan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency)," 2022.

³ E. T. Zebua, A. B. Ndraha, P. Lahagu, and F. Hulu, "Upaya Pemerintah Dalam Mengelola Diversity Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Gunungsitoli Barat," *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 5, no. 4, pp. 650–664, 2024.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi literatur yang diperoleh, kemudian menyusun informasi secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi Data: Menyaring informasi yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Penyajian Data: Menyusun hasil kajian dalam bentuk narasi tematik.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menganalisis temuan dari berbagai literatur untuk memberikan rekomendasi terkait urgensi penerapan SIA dalam penerimaan kas desa.

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

- a. Tidak menggunakan data primer seperti wawancara atau observasi langsung.
- b. Hasil analisis bergantung pada literatur yang tersedia dan dapat mengalami keterbatasan dalam cakupan data empiris.
- c. Tidak menggambarkan kondisi spesifik suatu desa tertentu, tetapi membahas secara umum berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang lengkap. Hasil dapat disajikan dengan gambar, grafik, tabel dan lainnya agar pembaca dapat dengan mudah memahami. Pembahasanpun dapat dibuat dengan beberapa sub-bagian.

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di setiap instansi pemerintah, termasuk di tingkat desa. SPIP diatur untuk menjamin bahwa setiap kegiatan dan transaksi pemerintah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks penerimaan kas di desa, SPIP bertujuan untuk mencegah penyimpangan, korupsi, dan ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi keuangan.

Implementasi SPIP dalam pengelolaan keuangan desa mengarah pada pentingnya sistem pengendalian yang sistematis dan terdokumentasi. Penggunaan SIA dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pelaksanaan SPIP, karena dengan sistem ini, setiap transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan dapat dipantau secara berkala. Proses pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan kas desa dan mengurangi potensi kecurangan. Oleh karena itu, SPIP yang diatur dalam peraturan ini mendasari urgensi penggunaan SIA dalam penerimaan kas di pemerintahan desa.

2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur berbagai hal mengenai tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku di setiap desa di Indonesia. Salah satu fokus utama dalam peraturan ini adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan tertib administratif. Hal ini meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang harus dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SIA dalam penerimaan kas di desa dapat mendukung tercapainya prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan ini, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya SIA, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap penerimaan kas tercatat dengan akurat dan dapat diaudit dengan mudah. Peraturan ini menjadi dasar bagi desa untuk mengimplementasikan SIA dan meningkatkan sistem pengendalian internal di dalamnya, serta meminimalisir risiko ketidaksesuaian atau manipulasi data keuangan.

a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu amanat utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan otonomi lebih besar kepada desa dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal pengelolaan keuangan, undang-undang ini mengatur bahwa desa berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri, namun dengan tetap mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa, Undang-Undang Desa mengharuskan penerapan sistem yang dapat menjaga integritas dan transparansi penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, penerapan SIA dalam penerimaan kas desa menjadi sangat relevan dengan amanat undang-undang ini, karena SIA dapat memberikan struktur yang jelas dalam pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan. Dengan SIA, desa dapat memastikan bahwa seluruh proses penerimaan kas tercatat dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mudah diaudit oleh pihak berwenang. Hal ini juga mendukung tercapainya tujuan undang-undang dalam mendorong pembangunan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

b. Sistem Informasi Akuntansi dalam Pemerintahan Desa

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memegang peranan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Salah satu contoh implementasi yang relevan adalah pada penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kantor Walikota Medan, sebagaimana dijelaskan oleh Fahri dan Nasution dalam penelitian mereka Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Bagian Umum Kantor Walikota Medan (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SIMDA Keuangan telah diterapkan, terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan aplikasi ini dan ketidakintegrasian sistem secara penuh dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Namun, keberadaan sistem ini tetap membantu dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa.

Selain itu, penelitian oleh Alfian, Kartika, dan Ferida dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Administrasi Berbasis Digital (2021) menggambarkan bagaimana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Kepunduhan, Kabupaten Tegal, mengoptimalkan potensi desa dengan digitalisasi laporan keuangan. Melalui pengelolaan keuangan berbasis Google Suite, BUMDes Bangun Bersama berhasil meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana desa.⁴ Program ini tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan dana desa tetapi juga memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan dana desa, Bayu Anggoro, Fikri Hamidy, dan Ade Dwi Putra dalam penelitian Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara) (2022) menemukan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alur pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, meskipun sistem ini masih bersifat offline dan hanya bisa diakses oleh perangkat desa.⁵ Hal ini memberikan ruang bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, meskipun akses informasi belum sepenuhnya terbuka untuk umum.

Namun demikian, meskipun penerapan SIA dapat meningkatkan akuntabilitas, berbagai hambatan tetap ada. Penelitian oleh Polutua, Mattoasib, dan Usmanc dalam Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (2022) menunjukkan bahwa faktor kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal yang lemah, dan implementasi SIA yang tidak optimal dapat menghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁶ Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparat desa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi dan penguatan sistem pengendalian internal untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik.

c. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Pemerintah Desa

Pencatatan penerimaan kas secara manual memiliki keterbatasan dalam hal transparansi dan akurasi, yang sering kali menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menyebabkan potensi kecurangan dan kesalahan dalam pencatatan, seperti yang dijelaskan oleh Ana Safitri, Sukemi Kamto Sudibyo, dan Eko Siswanto dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Metode Accrual Basic Pada Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis digital, seperti aplikasi Siskeudes, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pencatatan penerimaan kas di desa. Dengan sistem digital, pengelolaan keuangan dapat lebih mudah diakses, dan proses pencatatan data dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi potensi human error dan meningkatkan akurasi laporan keuangan desa.⁷

Selain itu, Rika Syahadatina dan Yeyen Kurnia dalam penelitian mereka Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujugan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan) (2021) menambahkan bahwa penerapan sistem Siskeudes di Desa Grujugan telah membantu mengintegrasikan berbagai pencatatan keuangan, mulai dari buku kas umum, buku kas pajak, hingga buku bank. Aplikasi ini memudahkan pencatatan penerimaan kas secara lebih terstruktur, sehingga mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam laporan keuangan.⁸

Pengelolaan penerimaan kas desa sering menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya transparansi, potensi kecurangan, dan keterlambatan dalam pencairan dana. Kasih Elnis Gulo dan Sophia Molinda Kakisina dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (2021) menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah

⁴ M. Alfian, D. Kartika, A. Ferida, and P. Harapan Bersama, "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Administrasi Berbasis Digital," *JURNAL DIKEMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2022.

⁵ B. Mayang Kab Lampung Utara, B. Anggoro, F. Hamidy, and A. Dwi Putra, "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec," 2022.

⁶ A. Polutu and R. Artikel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa I N F O A R T I K E L," *Jambura Accounting Review Journal homepage*, vol. 3, no. 2, pp. 66–78, 2022.

⁷ J. Ilmiah and S. Informasi, "Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Metode Accrual Basic Pada Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu," vol. 2, no. 2, pp. 10–15, 2023, [Online]. Available: <http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JUISI>

⁸ A. P. Sistem *et al.*, "EKOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan 1 Jurnal.unimor.ac.id/JEP Analysis of Application of Accounting Systems and Procedures in Village Fund Management (Case Study in Grujugan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency)," 2022.

penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas pengelolaan dana desa.⁹ Di banyak desa, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Ana Safitri pada tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa penerimaan kas sering kali terganggu oleh faktor ketidakpastian dalam pengelolaan transaksi, terutama ketika proses pencairan dana tidak dilakukan secara tepat waktu, sehingga berdampak pada efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.¹⁰

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa desa telah mengimplementasikan best practice dalam pencatatan penerimaan kas menggunakan sistem digital. Rika Syahadatina dan Yeyen Kurnia mengungkapkan bahwa di Desa Grujugan, pengelolaan kas yang menggunakan aplikasi Siskeudes telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan memudahkan pencatatan transaksi keuangan. Penerapan sistem ini juga memfasilitasi integrasi antar sektor dalam pengelolaan dana desa dan mempermudah akses data oleh pihak terkait. Penerapan aplikasi yang sama juga dianjurkan oleh Ana Safitri et al., yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi berbasis accrual mampu mempercepat proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, serta meningkatkan keamanan data.

d. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Penerapan Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes telah memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh Hijratul Aeni, Lukman Effendy, dan Nurabiah (2025) dalam jurnal berjudul "The Effectiveness of Implementing the Village Financial System (Siskeudes) in Improving Accountability of Village Financial Statements (Case Study of Taman Sari Village, Gunungsari Subdistrict)" menyimpulkan bahwa penerapan Siskeudes dapat meningkatkan efisiensi pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Hal ini terjadi karena adanya sistem yang memungkinkan pemantauan keuangan secara real-time, yang sebelumnya sangat sulit dilakukan menggunakan pencatatan manual.¹¹

Meskipun demikian, Dewi Nurjanah dan Bagus Ali Akbar (2023) dalam jurnal "Audit Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Menggunakan Framework COBIT 2019 (Studi Kasus Desa Karanghegar)" mencatat adanya kendala terkait kelengkapan dokumen, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terkadang tidak lengkap pada saat laporan diserahkan, yang bisa mengganggu akuntabilitas laporan keuangan desa.¹²

Siskeudes memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sistem pencatatan manual. Penelitian oleh Yuvensius Venerandus Nurak, Wilhelmina Mitran, dan Emilianus Eo Kutu Go'o (2024) dalam jurnal "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita" menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, serta mengurangi kesalahan pencatatan yang biasa terjadi pada sistem manual.¹³ Penggunaan sistem ini juga meningkatkan transparansi karena semua transaksi tercatat secara otomatis.

Namun, penelitian yang sama juga mengungkapkan bahwa Siskeudes masih kurang fleksibel, terutama dalam menangani tantangan pembangunan yang sifatnya dinamis. Seperti yang disoroti dalam penelitian Arif Bobihu dkk. (2022) yang berjudul "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Bonepantai", ditemukan bahwa perencanaan pembangunan desa masih lebih banyak terkonsentrasi pada aspek infrastruktur, sementara pemberdayaan masyarakat yang lebih berfokus pada partisipasi masyarakat belum maksimal.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas Siskeudes perlu ditingkatkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang lebih menyeluruh.

⁹ K. Elnis Gulo and S. Molinda Kakisina, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," vol. 2, no. 1, pp. 39–43, 2023, doi: 10.56248/jamane.v2i1.67.

¹⁰ S. R. Utami, R. N. Safitri, and Y. A. Kuncoroyakti, "Analisis jaringan dan aktor# Batalkan Omnibus Law di media sosial Twitter menggunakan social network analysis (SNA)," *Journal of Media and Communication Science*, vol. 4, no. 3, pp. 135–148, 2021.

¹¹ H. A. Milenia, L. Effendy, and N. Nurabiah, "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)," *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, vol. 7, no. 2, pp. 67–81, 2022.

¹² D. Nurjanah, A. Akbar, D. Nurjanah1, and A. Akbar2, "AUDIT SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 (STUDI KASUS DESA KARANGHEGAR)," 2023. [Online]. Available: <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/Fasilkom>

¹³ Y. V. Nurak, W. Mitran, and E. E. K. Go'o, "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita," *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 1, no. 3, pp. 243–256, 2023.

¹⁴ A. Bobihu, F. P. Tui, R. Tohopi, J. Abdussamad, and Y. N. Nani, "Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango)," *Jambura Journal of Administration and Public Service*, vol. 2, no. 2, pp. 99–107, 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, efektivitas penerapan Siskeudes sangat bergantung pada beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia dan dukungan dari pemerintah daerah. Penelitian oleh Petrus M. Pedro Wisang, Wilhelmina Mitani, dan Wilhelmina M. Yulia Jaeng (2023) dalam jurnal "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" menunjukkan bahwa kompetensi SDM lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa daripada hanya mengandalkan sistem Siskeudes.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi, Siskeudes tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Penelitian di Desa Tamboo (Bobihu dkk., 2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antara perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Siskeudes, di mana faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan disposisi memainkan peran yang sangat penting.¹⁶

e. Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak desa yang masih mengandalkan sistem manual dalam pengelolaan dana mereka. Sistem manual ini berpotensi menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, ketidakakuratan laporan keuangan, dan ketidakjelasan dalam pengawasan dana yang dapat merugikan desa. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dalam sistem keuangan desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu kemajuan teknologi yang dapat diterapkan adalah penggunaan aplikasi keuangan desa. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan dana desa dilakukan secara digital, yang mempermudah pencatatan transaksi, pemantauan anggaran, dan pelaporan keuangan. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, baik oleh pihak pengelola keuangan desa maupun masyarakat yang membutuhkan transparansi laporan.

Selain itu, digitalisasi juga mempermudah pengawasan terhadap aliran dana desa. Dengan sistem digital, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan monitoring terhadap penggunaan dana desa dengan lebih mudah dan transparan. Hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Para pejabat desa juga dapat memperoleh laporan secara real-time, yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan dana.

Meskipun demikian, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak desa. Akses internet yang terbatas, perangkat keras yang kurang memadai, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparat desa menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem digital ini. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam infrastruktur teknologi serta pelatihan bagi aparatur desa agar dapat menggunakan aplikasi keuangan desa dengan efektif.

Perbandingan antara desa yang menggunakan sistem keuangan modern dengan yang masih mengandalkan sistem manual menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal efisiensi dan akuntabilitas. Desa yang sudah mengadopsi sistem digital cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana desa, dengan laporan yang lebih cepat dan lebih jelas. Sementara itu, desa yang masih menggunakan sistem manual seringkali mengalami keterlambatan dalam pelaporan, serta kesulitan dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan dana.

Digitalisasi pengelolaan keuangan desa juga mempermudah pemanfaatan dana desa untuk berbagai program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui alokasi dana dan perkembangannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan penggunaan dana desa.

Tantangan terbesar dalam penerapan teknologi di tingkat desa adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat desa. Sebagian besar aparat desa belum terbiasa menggunakan perangkat digital secara optimal, yang menghambat implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan pelatihan bagi aparat desa agar mereka dapat memahami cara menggunakan aplikasi keuangan desa dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi keuangan desa semakin beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Beberapa aplikasi bahkan memungkinkan pengelolaan dana desa dilakukan secara terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah pusat atau daerah, sehingga memudahkan proses pelaporan dan audit. Hal ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, desa yang masih mengandalkan sistem manual tidak boleh diabaikan. Sebelum implementasi teknologi dilakukan, desa harus terlebih dahulu memperkuat kapasitas dan infrastruktur yang ada. Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

¹⁵ P. M. P. Wisang, W. Mitani, and W. M. Y. Jaeng, "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Nita dan Desa Lusitad)," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, vol. 2, no. 4, pp. 365–385, 2023.

¹⁶ A. Bobihu, F. P. Tui, R. Tohopi, J. Abdussamad, and Y. N. Nani, "Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango)," *Jambura Journal of Administration and Public Service*, vol. 2, no. 2, pp. 99–107, 2022.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan teknologi, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem digital, seperti aplikasi keuangan desa, dapat mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memperbaiki akurasi laporan keuangan. Digitalisasi juga mempermudah pengawasan aliran dana desa oleh pemerintah pusat dan daerah, yang berujung pada pengurangan potensi penyalahgunaan dana dan peningkatan akuntabilitas. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya tingkat literasi digital di desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan kepada aparat desa agar dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi. Meskipun ada tantangan, penerapan teknologi yang tepat dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Terutama kepada para penulis, praktisi, dan pemerintah yang telah memberikan referensi dan informasi yang berguna terkait dengan penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

REFERENSI

- [1] Z. Fahri and J. Nasution, "Penerapan sistem informasi akuntansi di bagian umum kantor walikota medan," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 9, no. 2, 2021.
- [2] A. P. Sistem *et al.*, "EKOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan 1 Jurnal.unimor.ac.id/JEP Analysis of Application of Accounting Systems and Procedures in Village Fund Management (Case Study in Grujugan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency)," 2022.
- [3] E. T. Zebua, A. B. Ndraha, P. Lahagu, and F. Hulu, "Upaya Pemerintah Dalam Mengelola Diversity Sumber Daya Manusia Di Kecamatan Gunungsitoli Barat," *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 5, no. 4, pp. 650–664, 2024.
- [4] M. Alfian, D. Kartika, A. Ferida, and P. Harapan Bersama, "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Administrasi Berbasis Digital," *JURNAL DIKEMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2022.
- [5] B. Mayang Kab Lampung Utara, B. Anggoro, F. Hamidy, and A. Dwi Putra, "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec)," 2022.
- [6] A. Polutu and R. Artikel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa I N F O A R T I K E L," *Jambura Accounting Review Journal homepage*, vol. 3, no. 2, pp. 66–78, 2022.
- [7] J. Ilmiah and S. Informasi, "Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Metode Accrual Basic Pada Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu," vol. 2, no. 2, pp. 10–15, 2023, [Online]. Available: <http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JUISI>
- [8] K. Elnis Gulo and S. Molinda Kakisina, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," vol. 2, no. 1, pp. 39–43, 2023, doi: 10.56248/jamane.v2i1.67.
- [9] S. R. Utami, R. N. Safitri, and Y. A. Kuncoroyakti, "Analisis jaringan dan aktor# Batalan Omnibus Law di media sosial Twitter menggunakan social network analysis (SNA)," *Journal of Media and Communication Science*, vol. 4, no. 3, pp. 135–148, 2021.
- [10] H. A. Milenia, L. Effendy, and N. Nurabiah, "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)," *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, vol. 7, no. 2, pp. 67–81, 2022.
- [11] D. Nurjanah, A. Akbar, D. Nurjanah1, and A. Akbar2, "AUDIT SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 (STUDI KASUS DESA KARANGHEGAR)," 2023. [Online]. Available: <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/Fasilkom>

- [12] Y. V. Nurak, W. Mitani, and E. E. K. Go'o, "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita," *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 1, no. 3, pp. 243–256, 2023.
- [13] A. Bobihu, F. P. Tui, R. Tohopi, J. Abdussamad, and Y. N. Nani, "Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango)," *Jambura Journal of Administration and Public Service*, vol. 2, no. 2, pp. 99–107, 2022.
- [14] P. M. P. Wisang, W. Mitani, and W. M. Y. Jaeng, "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Nita dan Desa Lusitada)," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, vol. 2, no. 4, pp. 365–385, 2023.